



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KOTA CIMAHI

TAHUN 2011



*Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi*

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KOTA CIMAHI TAHUN 2011

Nomor Publikasi :
Nomor Katalog :
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : 46 halaman
Naskah : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
Gambar Kulit dan Seting : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
Diterbitkan : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, publikasi “ **Indeks Pembangunan Gender Kota Cimahi Tahun 2011**” yang memuat informasi tentang Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Cimahi ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu ragam publikasi yang disusun atas prakarsa BPS Kota Cimahi dalam rangka menyebarkan data statistik khususnya yang berkaitan dengan data gender.

Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk menyajikan data tentang perbedaan peran atau keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki diberbagai bidang sosial ekonomi agar kesenjangan data yang ada selama ini sedikit tertutupi. Data yang digunakan adalah hasil survei BPS dan catatan berbagai instansi/DPRD. Analisis yang dibuat masih terbatas, baik dari segi kedalaman maupun segi banyaknya indikator dan sektor yang dicakup. Namun demikian, diharapkan informasi yang disajikan dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data gender.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini. Masukan yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan publikasi ini kami terima dengan senang hati.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Cimahi, 4 November 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi



Drs. H. Agus Praptono, M. Stat
Nip. 19660802 199401 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Cakupan	3
1.4 Sumber Data	4
BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	5
2.1 Konsep Pembangunan Manusia dan Komponennya ...	5
2.2 Definisi dan Konsep Gender	6
2.3 Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ...	11
BAB III. PENCAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER	17
3.1 Pencapaian Pembangunan Gender Kota Cimahi	18
3.2 Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Gender Kota Cimahi	21
3.3 Disparitas Pencapaian Indeks Pembangunan Gender Antar Wilayah di Jawa Barat	26
3.4 Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Gender di Wilayah Bandung Raya	29
TABEL-TABEL LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi Tahun 2007-2011	20
Tabel 3.2 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan IPG Tertinggi Tahun 2010-2011	28
Tabel 3.3 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan IPG Terendah Tahun 2010-2011	29

<https://cimahikota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perkembangan IPG Kota Cimahi Tahun 2007-2011	19
Grafik 3.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2011 di Kota Cimahi	22
Grafik 3.3. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Laki-Laki dan Perempuan di Kota Cimahi Selama Tahun 2010-2011	23
Grafik 3.4. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Cimahi Tahun 2010-2011	24
Grafik 3.5. Perkembangan Sumbangan Pendapatan Kota Cimahi, 2010-2011	25
Grafik 3.6. IPG Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Peringkat Tahun 2011	27
Grafik 3.7. Perkembangan IPG Wilayah Bandung Raya Tahun 2007 – 2011	30
Grafik 3.8. Angka Harapan Hidup (AHH) di Wilayah Bandung Raya Tahun 2011	31
Grafik 3.9. Angka Melek Huruf (AMH) Laki-Laki dan Perempuan di Wilayah Bandung Raya Tahun 2011	31
Grafik 3.10. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2011 di Wilayah Bandung Raya	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat hidup masyarakat suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan, dengan adanya otonomi daerah mensyaratkan pemerintah maupun masyarakat lebih bisa berkreasi dan melakukan inovasi dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Kota Cimahi, semenjak menjadi daerah otonomi pada Tahun 2003 telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam menata dan membangun kota.

Dewasa ini, perhatian Indonesia terhadap pembangunan yang berbasis gender makin besar. Telah lama diketahui bahwa di banyak negara telah terjadi diskriminasi gender. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender merupakan akibat dari adanya sistem atau struktur sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan (BKKBN 2007).

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, kian menjadi perhatian komunitas negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan diberbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Kemudian permasalahan lain yang kerap dialami perempuan yaitu *double burden* (beban ganda) dimana peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah

publik, tetapi tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Keprihatinan negar-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi yang telah dicatat dalam dokumen sejarah dimulai dari dicituskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia), oleh PBB pada tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh deklarasi dan konvensi lainnya. Bahkan dalam Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup :

1. Perempuan dan Kemiskinan,
2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan,
3. Perempuan dan Kesehatan,
4. Kekerasan terhadap Perempuan.
5. Perempuan dan Konflik bersenjata,
6. Perempuan dan Ekonomi,
7. Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan,
8. Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan,
9. Hak Azasi Perempuan,
10. Perempuan dan Media,
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
12. Anak Perempuan.

Di Indonesia sebagian keprihatinan tersebut di atas juga menjadi masalah. Walaupun demikian upaya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sudah sejak lama dilakukan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita pada Tahun 1978 yang kemudian statusnya meningkat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 1999.

Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat, Kota Cimahi ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju setara gender. Untuk itu, pemerintah berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan

Milenium (MDG's) dengan salah satu targetnya, menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan menengah Tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari Tahun 2015.

Makin disadarinya arti pentingnya aspek gender dalam segala bidang pembangunan membawa dampak positif dalam upaya menuju pengarusutamaan gender. Menanggapi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Kota Cimahi dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan. Melalui inpres ini muncul momentum bagi kemajuan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender yang akhirnya diperluas hingga perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender.

Untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan-peraturan perundangan sudah responsif gender dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari indikator-indikator yang terpilah gender. Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender di Kota Cimahi. Diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai pembuka wawasan tentang pembangunan manusia yang berbasis gender.

1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang yang direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu juga akan ditelusuri hubungan yang terdapat antara IPM dan IPG.

1.3 Cakupan

Penyusunan publikasi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, sistematika penulisan, serta sumber data. Bab 2 menjelaskan tentang gambaran umum gender di Kota Cimahi dan capaiannya terutama jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di

wilayah Bandung Raya. Bab 3 menjelaskan mengenai hubungan antara IPG dan IPM. Bab 4 adalah penutup.

1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPG adalah data Susenas Kor, Susenas Modul Konsumsi dan data Sakernas. Sementara untuk data penunjang digunakan data SUPAS, Proyeksi Penduduk (SP2000), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) serta data sekunder lainnya. Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung indikator pembentuk IPG, yaitu angka harapan hidup dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sementara data Sakernas digunakan untuk menghitung komponen IPG yang menyangkut ketenagakerjaan.

BAB II

METODOLOGI PENGHITUNGAN

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

2.1 Konsep Pembangunan Manusia dan Komponennya

Persoalan pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Kota Cimahi sudah mulai mendapat perhatian yang cukup serius yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan indikator-indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender. Berbagai masalah mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mulai terlihat bergeser. Secara singkat perbandingan antar wilayah bisa dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator yang menggambarkan variabel tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia dari tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Pendekatan Pembangunan Manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia secara bersamaan memuat semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik atau nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan manusia mempunyai empat elemen, yaitu : produktifitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang maupun generasi penerus. Semua orang perempuan

ataupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.2 Definisi dan Konsep Gender

Gender berasal dari bahasa latin yaitu "genus", yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya, tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya. Sebagai contoh : kalau dulu hanya perempuan yang menggunakan anting-anting, akhir-akhir ini ternyata banyak juga laki-laki yang menggunakan anting-anting. Tren juga sangat tergantung kepada tempat dan wilayah, misalnya bila di sebuah desa perempuan memakai celana dianggap tidak pantas, maka di tempat lain bahkan sudah jarang menemukan perempuan memakai rok. Karena bentukan juga, maka gender bisa dipertukarkan. Misalnya kalau dulu pekerjaan memasak selalu dikaitkan dengan perempuan, maka sekarang ini sudah mulai banyak laki-laki yang malu karena tidak bisa mengurus dapur atau susah karena harus tergantung kepada perempuan agar tidak kelaparan.

Gender

Semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki digambarkan memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah; sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminim seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja periklanan dan media.

Isu Gender

Masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender.

Sensitivitas Gender

Kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sensitivitas gender diharapkan mampu menjadi alat untuk melihat ketidakadilan yang muncul berkaitan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki dari ranah domestik maupun publik.

Buta Gender

Tidak adanya pemahaman dan kesadaran dalam diri seseorang bahwa gender adalah faktor kultural yang mempengaruhi pilihan-pilihan hidup yang tersedia baginya dalam masyarakat.

Kesenjangan / Ketimpangan Gender

Suatu kondisi yang menunjukan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam pekerjaan, pendapatan, kesempatan, dan penghargaan.

Peran Gender

Peran sosial yang diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin, misalnya peran mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai tugas

dan tanggung jawab perempuan, padahal peran tersebut bagi perempuan bukan kodrati, melainkan konstruksi sosial, sehingga laki-laki pun sebenarnya dapat melakukannya.

Kesetaraan Gender

Persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak seorangpun yang terabaikan kesempatan dan hak azasinya. Keduanya diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan

Analisis gender

Suatu analisis yang digunakan oleh perencana/pembuat kebijakan untuk menilai dampak kebijaksanaan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atau atas program atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan.

Perspektif Gender

Mengkaji masalah-masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya dari sudut pandang yang mempertimbangkan keberadaan laki-laki dan perempuan. Perspektif gender menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi, politik sosial dan budaya berproyeksi mempengaruhi terjadinya diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin.

Gender Responsif

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan mengacu pada rasa keadilan.

Pengarusatamaan Gender

Usaha agar kebijakan apapun yang dikeluarkan pejabat pemerintah dan swasta (baik dalam bentuk kebijakan, undang-undang, peraturan, maupun kebijakan yang bersifat teknis) harus selalu mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan ini harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan sampai tahap evaluasi.

Bagaimana bentuk hubungan antar gender ?

Hubungan antar gender ialah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang bersifat saling membantu atau sebaliknya, serta memiliki banyak perbedaan dan ketidaksetaraan. Hubungan gender berbeda dari waktu ke waktu, dan antarmasyarakat satu dengan masyarakat lain, akibat perbedaan suku, agama, status sosial maupun nilai (tradisi dan norma yang dianut).

Apakah ketidakadilan gender itu ?

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Ketidakadilan gender terjadi apabila ada diskriminasi terhadap akses dan kontrol antara perempuan dan laki-laki. Salah satu jenis kelamin tidak diberikan kesempatan pendidikan, pekerjaan, atau kesehatan yang seharusnya.

Bagaimana sifat ketidakadilan gender ?

Ketidakadilan gender dapat bersifat :

- Langsung, yaitu perbedaan perlakuan secara terbuka dan langsung, baik disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai, maupun aturan yang berlaku.
- Tidak langsung, seperti peraturan sama, tapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu.
- Sistematis, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membedakan.

Bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi gender ?

Memperlakukan seseorang atau kelompok orang secara berbeda karena alasan jenis kelamin, umur, ras, atau agama. Diskriminasi atas dasar jenis kelamin disebut seksisme, sedangkan diskriminasi atas dasar peran, fungsi, hubungan laki-laki dan perempuan disebut diskriminasi gender, diantaranya adalah :

- Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalkan banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena hanya sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber dari keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).
- Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki.
- Stereotip (citra buruk) yaitu pelabelan negatif yang diberikan masyarakat kepada jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan. Sebagai contoh, masyarakat menganggap laki-laki itu rasional, kuat, aktif, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan itu emosional, penakut, pasif dan

sebagainya. Stereotip itu kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dianggap tidak pantas menjadi pemimpin karena dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan daripada rasio.

- *Violence* (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan adalah pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.
- Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya seseorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah, disamping itu, kadang ia juga mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.

2.3 Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPM mengukur rata-rata capaian secara umum dan oleh karenanya menyembunyikan perbedaan tingkat pembangunan manusia yang dicapai oleh laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar sama seperti IPM, yaitu : angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender seperti halnya IPM, IPG (*Gender – Related Development Index* atau GDI) maupun IDG (*Gender Empowerment Measure* atau GEM) merupakan indeks komposit yang terdiri dari sejumlah komponen dan variabel. Namun berbeda dengan IPM, IPJ maupun IDJ memperhitungkan ekstensi ketidaksamaan aversi (*inequality aversion*) yang ditunjukkan elastisitas marginal akibat kenaikan pencapaian.

Untuk menghitung IPG terlebih dahulu dihitung nilai X_{ede} . Nilai tersebut menunjukkan ukuran capaian yang didistribusikan secara sama (*equality distributed*

equivalent anbievement). X_{ede} merupakan suatu tingkat capaian yang sama antar jenis kelamin ($X_f = X_{ede}$ dan $X_m = X_{ede}$) dari masing-masing komponen, dihitung menggunakan persamaan :

$$X_{ede} = P_f X_f^{(1-\varepsilon)} + P_m X_m^{(1-\varepsilon)} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- X_f = menunjukkan capaian perempuan
- X_m = menunjukkan capaian laki-laki
- P_f = proporsi penduduk perempuan
- P_m = proporsi penduduk laki-laki.
- ε = ekstensi ketidaksamaan aversi = 2

Khusus untuk komponen indeks distribusi pendapatan dihitung dengan tahapan sebagai berikut :

- ❖ Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sektor non pertanian (W_f)
- ❖ Menghitung upah rata-rata (W) dengan rumus :

$$W = Aec_f (W_f) + Aec_m (1) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

- Aec_f = proporsi tenaga kerja (aktif secara ekonomi) perempuan
- Aec_m = proporsi tenaga kerja (aktif secara ekonomi) laki-laki
- W_f = rasio upah perempuan di sektor non pertanian

- ❖ Menghitung rasio upah-upah masing-masing jenis kelamin terhadap upah rata-rata (W) (=R)

- ❖ Menghitung sumbangan pendapatan (IncS) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$\text{IncS} = A_{ec(f/m)} \cdot R_{(f/m)} \quad \dots\dots (3)$$

- ❖ Menghitung proporsi sumbangan pendapatan (% IncS) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$\% \text{ IncS} = \text{IncS}_{(f/m)} / P_{(f/m)} \quad \dots\dots (4)$$

- ❖ Menghitung X_{ede} dari % IncS (= $X_{ede}(\text{Inc})$)
- ❖ Menghitung indeks distribusi pendapatan (I_{disinc}) dengan rumus :

$$I_{disinc} = (X_{ede(inc)} \cdot PPP_{min}) / (PPP_{maks} - PPP_{min}) \quad \dots\dots(5)$$

Akhirnya angka IPG dapat dihitung menggunakan persamaan :

$$\text{IPG} = 1/3 (X_{ede} (1) + X_{ede} (2) + I_{disinc}) \quad \dots\dots (6)$$

dimana :

$X_{ede} (1)$ = X_{ede} angka harapan hidup

$X_{ede} (2)$ = X_{ede} pendidikan

I_{disinc} = Indeks distribusi pendapatan

Sumber data yang digunakan untuk menghitung IPG sama dengan sumber data IPM. Data upah yang diperlukan untuk menghitung X_{ede} standar hidup layak dalam IPG maupun IDJ digunakan data Susenas 2011.

Penghitungan IPG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- ❖ Menghitung indeks setiap komponen untuk masing-masing jenis kelamin dengan batasan maksimum dan minimum seperti dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPG

Indikator Komponen IPM (X_i)	Nilai Maksimum (X_i)		Nilai Minimum (X_i)		Catatan
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Angka Harapan Hidup	82,5	87,5	22,5	27,5	Sesuai Standar Global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	100	0	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah	15	15	0	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Konsumsi Perkapita	732,72		300,00		UNDP menggunakan GDP perkapita riil yang disesuaikan

- ❖ Menghitung nilai X_{ede} dari hasil penghitungan indeks pada tahap pertama menggunakan persamaan (1)
 - ❖ Menghitung IPG menggunakan persamaan (6)
- Untuk keperluan ilustrasi dipilih Propinsi A tahun 2010 yang memiliki data sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator-Indikator Penghitungan Angka IPG

Di Propinsi A Tahun 2010

Indikator	Perempuan	Laki-Laki
Angka Harapan Hidup	66,3	62,5
Angka Melek Huruf	90,5	95,7
Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	6,7	7,7
Share of Income (Aec)(%)	34,89	65,11
Proporsi Penduduk (PPopn)	0,493	0,507

Tahap 1. Menghitung indeks angka harapan hidup dan indeks pendidikan

Indeks angka harapan hidup :

- . Perempuan : $(66,3 - 27,5) / (87,5 - 27,5) = 0,6467$
- . Laki- Laki : $(62,5 - 22,5) / (82,5 - 22,5) = 0,6667$

Berdasarkan persamaan (3) dengan $\varepsilon = 2$ maka :

$$X_{ede} (1) = [(0,4930) (0,6467)^{-1} + (0,507)(0,6667)^{-1}]^{-1} = 0,66$$

Indeks Melek Huruf :

- . Perempuan : $(90,5 - 0) / 100 = 0,905$
- . Laki-laki : $(95,7 - 0) / 100 = 0,957$

Indeks rata-rata lama sekolah :

- . Perempuan : $(6,7 - 0) / (15-0) = 0,4467$
- . Laki-laki : $(7,7 - 0) / (15-0) = 0,5133$

Indeks Pendidikan :

- . Perempuan : $1/3 (0,4467) + 2/3 (0,905) = 0,7522$
- . Laki-laki : $1/3 (0,5133) + 2/3 (0,905) = 0,8091$

Berdasarkan persamaan (3) dengan $\varepsilon = 2$, maka

$$X_{ede} (2) = [(0,493) (0,7522)^{-1} + (0,507)(0,8091)^{-1}]^{-1} = 0,78$$

Tahap 2. Menghitung Indeks Distribusi Pendapatan

Proporsi sumbangan (% IncS) dengan persamaan (6)

- . Perempuan : $0,2483 / 0,4974 = 0,499$

$$\cdot \text{ Laki-laki} \quad : 0,7517 / 0,5026 = 1,495$$

Berdasarkan persamaan (3) dengan $^{\circ} = 2$ maka :

$$X_{\text{ede}} (\text{Inc}) = [(0,4966) (0,499)^{-1} + (0,5026)(1,495)^{-1}] = 0,751$$

Penghitungan Indeks distribusi pendapatan (IdisInc) dengan persamaan (7) :

$$= [(0,751 \times 532,0) - 300] / [732,72 - 300] = 0,25$$

Tahap 3 Menghitung IPJ

Akhirnya IPJ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (8)

$$(0,66 + 0,78 + 0,25) / 3 = 0,563$$

Seperti halnya IPM, dalam laporan ini IPG disajikan dalam ratusan (dikalikan 100)

BAB III

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER

Kesetaraan gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik semata, namun jauh lebih luas pengertiannya, yakni kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang kehidupan. Sementara itu, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan yang selama ini dilaksanakan mengakomodasi persoalan gender, maka diperlukan sebuah ukuran yang dapat menjelaskan bahwa pencapaian kesetaraan dan keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Beberapa ukuran tentang kesetaraan gender telah digunakan banyak pihak, meski ukuran tersebut masih bersifat tunggal (*tunggal variable*). Namun di dalam perkembangannya, ukuran yang bersifat komprehensif dan representatif mutlak dibutuhkan. *United Nation Development Programme (UNDP)* melalui Laporan Pembangunan Manusia Tahun 1995 memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat gabungan (*komposit*) dari empat indikator, yang menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan

Gender (IPG)¹. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan. Sementara itu, pencapaian pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil pengurangan antara IPM dengan IPG mengindikasikan adanya kesenjangan pencapaian kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Pada bab ini akan dibahas mengenai pencapaian pembangunan gender di Kota Cimahi yang mencakup perkembangannya hingga Tahun 2011.

3.1. Pencapaian Pembangunan Gender Kota Cimahi

Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jaminan persamaan status dan kedudukan ini meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas dasar (BPS, 1998). Program peningkatan kapabilitas dasar yang dimaksud mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan pemerintah kepada semua penduduk. Namun kenyataannya, implementasi kepada kehidupan sehari-hari khususnya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Nilai-nilai sosial budaya patriarki ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Belum lagi persoalan ketidaktepatan pemahaman ajaran agama yang seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat (Parawansa, 2003). Untuk itu, diperlukan upaya lebih serius dan berkesinambungan dalam mewujudkan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai program pembangunan seperti

peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga lainnya, melalui upaya ini diharapkan peningkatan kapabilitas dasar perempuan akan dapat segera diwujudkan.

Grafik 3.1. Perkembangan IPG Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011



Sumber : BPS RI

Secara umum pencapaian pembangunan gender di Kota Cimahi dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang makin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu 2007-2011 (Gambar 3.1) pada Tahun 2007 IPG Kota Cimahi mencapai 65,60, kemudian naik menjadi 65,85 pada Tahun 2009 dan bergerak naik lagi dengan cepat hingga menjadi 67,40 pada Tahun 2011.

Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan IPG dalam kurun waktu 2007-2011 tersebut belum memberikan gambaran yang menggembirakan apabila dilihat dari kerangka pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan pencapaian IPG selama kurun waktu tersebut masih belum mampu mengurangi jarak secara nyata dalam pencapaian

kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Gap antara IPM dengan IPG masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarnya.

Tabel 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Rasio %
2007	74,42	65,60	88,15
2008	74,79	65,68	87,82
2009	75,17	65,85	87,60
2010	75,51	66,78	88,44
2011	76,01	67,40	88,67

Sumber : BPS RI

Seperti kita ketahui, pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup selama beberapa dekade telah mengalami kemajuan. Namun, hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup masih tampak kentara cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG yang menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan IPM. Pada perkembangannya, selama kurun waktu 2007 – 2011 IPG Kota Cimahi selalu dalam posisi lebih rendah dibandingkan IPM. Rasio IPG terhadap IPM yang diperoleh berada pada kisaran 88 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa masih terjadi kesenjangan gender meski IPG memperlihatkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2007-2011 (Tabel 3.1). Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan melalui berbagai kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan sehingga gap yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan dapat diperkecil jaraknya. Keberhasilan

upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan angka IPG.

3.2 Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Gender Kota Cimahi

Peningkatan IPG selama kurun waktu 2010-2011 tersebut tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen IPG itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2010-2011 terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Pada subbab ini akan dibahas perkembangan masing-masing komponen IPG di Kota Cimahi.

3.2.1 Angka Harapan Hidup Kota Cimahi

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengavaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.2 memperlihatkan AHH laki-laki dan perempuan Tahun 2010-2011 di Kota Cimahi.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa tidak terjadi perubahan pada AHH laki-laki maupun perempuan pada periode 2010-2011. Hal lain yang lebih mencolok adalah adanya gap antara AHH laki-laki dan perempuan. Hanya saja khusus untuk komponen AHH, angka untuk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pola ini memang telah umum terjadi di berbagai tempat dimana penyebab utamanya adalah pada awal hidupnya kondisi bayi perempuan memang lebih kuat daripada bayi laki-laki. Angka kematian untuk bayi laki-laki lebih tinggi daripada bayi perempuan. Namun demikian kondisi alami ini tidak mengecilkan keharusan bagi pemerintah untuk terus berusaha mempersempit gap antara kesehatan laki-

laki dan perempuan ini melalui tindakan promosi kesehatan atau pencegahan yang dapat dilakukan sedini mungkin.

Grafik 3.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2011 di Kota Cimahi



Sumber : BPS RI

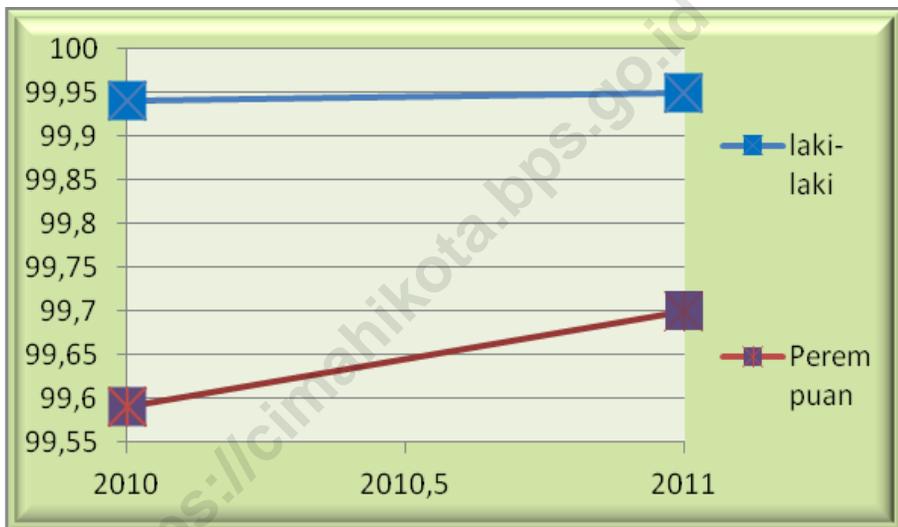
3.2.2 Angka Melek Huruf Kota Cimahi

Kemajuan di bidang pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan pembangunan manusia, karena pendidikan membawa dampak positif bagi kualitas manusia. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah menjadi program prioritas dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan.

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam IPM maupun IPG adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan indikator RLS adalah rata-rata jumlah

tahun yang dialami oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Perkembangan AMH baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2010-2011 terus meningkat, namun kenaikannya berjalan lambat terutama untuk laki-laki.

Grafik 3.3. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Laki-laki dan Perempuan Di Kota Cimahi Selama Tahun 2010 – 2011



Sumber : BPS RI

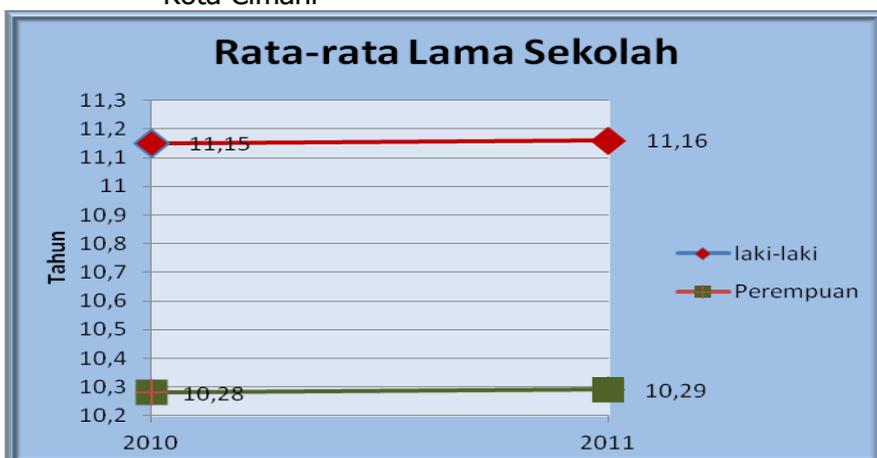
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berlaku baik untuk AMH laki-laki maupun perempuan. Meski AMH perempuan masih lebih rendah dibandingkan AMH laki-laki, namun suatu hal yang menggembirakan adalah bahwa peningkatan AMH perempuan lebih cepat dibandingkan AMH laki-laki. Pada periode 2010-2011 AMH perempuan meningkat 0,15 persen dari 99,59 persen pada Tahun 2010 menjadi 99,74 persen pada Tahun 2011. Sementara itu, AMH laki-laki hanya meningkat 0,04 persen dari 99,94 persen pada Tahun 2010 menjadi 99,98 persen pada Tahun 2011. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang buta huruf hanya mencapai 0,11 persen, sedangkan perempuan 0,32 persen.

3.2.3 Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan di Kota Cimahi masih terjadi ketimpangan kemampuan baca tulis antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab ketimpangan tersebut adalah belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama bagi keluarga dengan kemampuan yang sangat terbatas atau keluarga miskin yang jumlahnya masih cukup besar.

Seperti halnya dengan komposisi AMH penduduk, untuk RLS penduduk laki-laki pun secara umum lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibandingkan RLS penduduk perempuan (Gambar 3.4). Pada Tahun 2011 RLS laki-laki 11,16 tahun, naik dari tahun sebelumnya 11,15 tahun. Artinya pada Tahun 2010-2011 secara umum pendidikan penduduk laki-laki di Cimahi yang dijalani setara dengan kelas 2 SMA. Sedangkan AMH perempuan meningkat dari 10,28 menjadi 10,29 pada Tahun 2011, yang berarti setara kelas 1 SMA. Pola seperti ini berlangsung dari tahun ke tahun selama periode 2010-2011. Perbedaan pencapaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan hampir tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tersebut.

Grafik 3.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2011 di Kota Cimahi



Sumber : BPS RI

3.2.4. Sumbangan Pendapatan Kota Cimahi

Grafik 3.5 menyajikan sumbangan pendapatan dalam pekerjaan di sektor non pertanian baik laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi. Pada Tahun 2011, sumbangan pendapatan perempuan dalam pekerjaan di sektor non pertanian mengalami perlambatan sebesar 0,12 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 sumbangan pendapatan perempuan mencapai 28,96 persen turun dari Tahun 2010 yang mencapai 29,08 persen. Sumbangan ini terkait dengan dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor tenaga kerja dan upah yang diterima.

Faktor upah secara nominal setiap tahun mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang selalu mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pada penghitungan IPG, komponen upah menggunakan data upah buruh di sektor non pertanian.

Grafik 3.5. Perkembangan Sumbangan Pendapatan Kota Cimahi, 2010-2011



Sumber : BPS RI

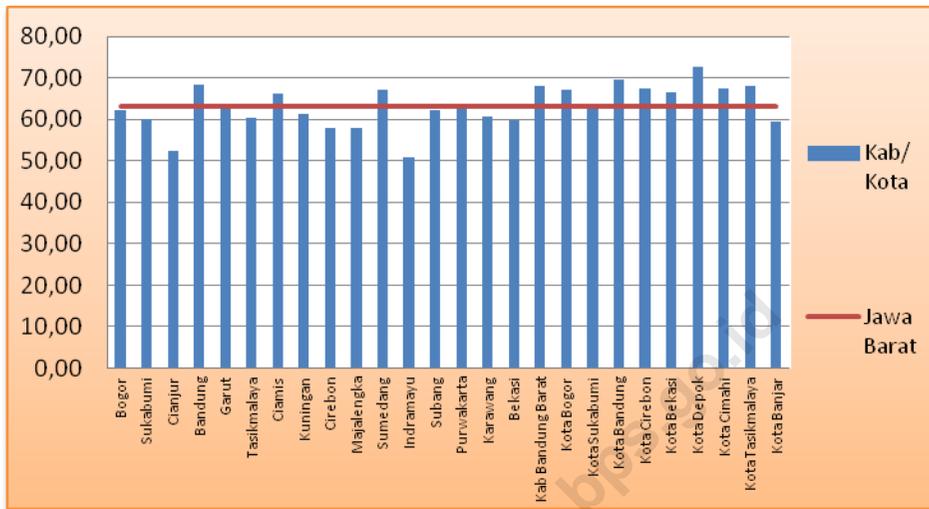
Persoalan pembangunan manusia berbasis gender di Kota Cimahi sudah mulai mendapat perhatian yang cukup serius yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan indikator-indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender. Secara singkat perbandingan antar kabupaten atau kota bisa dilakukan dengan membandingkan indeks pembangunan gender tiap daerah.

3.3 Disparitas Pencapaian Indeks Pembangunan Gender Antar Wilayah Di Jawa Barat

Pembangunan Jawa Barat seyogyanya merupakan pembangan merata di seluruh wilayah Jawa Barat, tetapi salah satu masalah pembangunan di Jawa Barat adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Wilayah bagian Kota Jawa Barat cenderung mengalami pembangunan yang lebih pesat dibandingkan wilayah pedesaan di Jawa Barat. Akibatnya, kualitas sumber daya di wilayah pedesaan tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan, salah satunya terkait dengan kondisi alamnya dan kondisi infrastruktur dibagian pedalaman sehingga tercipta daerah-daerah kantong-kantong terisolasi (BPS, 2001). Ketertinggalan pembangunan menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah yang tercermin pada hasil pencapaian pembangunan gender, pada subbab ini akan mengulas tentang kesenjangan pembangunan gender di Jawa Barat.

Gambaran lebih lengkap mengenai tingkat capaian pembangunan gender sebagai dampak dari kegiatan pembangunan di Jawa Barat dapat dilihat dari angka IPG Propinsi Jawa Barat. Grafik 3.6 menyajikan pencapaian IPG setiap kabupaten/kota pada Tahun 2011. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa, pencapaian IPG tiga belas kabupaten/kota melebihi rata-rata IPG Jawa Barat. Ketiga belas kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.

Grafik 3.6. IPG Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Peringkat Tahun 2011



Sumber : BPS RI

Meskipun demikian, jika dilihat dari perkembangannya pencapaian IPG untuk seluruh kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa pembangunan gender di semua kabupaten/kota telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu upaya lebih kuat lagi untuk meningkatkan kapabilitas perempuan mengingat kesenjangan gender masih terjadi di kabupaten/kota. Di Propinsi Jawa Barat mencapai 62,38, setahun kemudian IPG Jawa Barat meningkat sebesar 0,87 point menjadi 63,25. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian, bila dibandingkan dengan IPM, dengan nilai sebesar 72,73, maka keberhasilan tersebut masih menyisakan kesenjangan.

Di tingkat kabupaten/kota IPG relatif bervariasi. Pencapaian IPG tertinggi Tahun 2011 diraih oleh Kota Depok dengan nilai 72,68, sedangkan IPG terendah sebesar 50,79 oleh Kabupaten Indramayu. Dengan demikian selisih pencapaian IPG tertinggi dan terendah sekitar 21,89 point. Pada Tahun 2010, jarak yang ditimbulkan oleh perbedaan pencapaian IPG tertinggi dan IPG terendah sekitar 22,47 point (tertinggi Kota Depok dengan IPG 71,94 dan terendah Kabupaten Indramayu sebesar 49,47). Hal ini berarti bahwa disparitas pembangunan gender

di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2011 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2. Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan IPG tertinggi Tahun 2010-2011

2010	IPG	2011	IPG
Kota Depok	71,94	Kota Depok	72,68
Kota Bandung	69,08	Kota Bandung	69,65
Kabupaten Bandung Barat	67,72	Kabupaten Bandung	68,26
Kabupaten Bandung	67,75	Kabupaten Bandung Barat	68,17
Kota Tasikmalaya	67,44	Kota Tasikmalaya	68,11
Kota Cirebon	67,01	Kota Cirebon	67,58
Kota Cimahi	66,78	Kota Cimahi	67,40
Kabupaten Sumedang	66,66	Kabupaten Sumedang	67,24
Kota Bogor	66,43	Kota Bogor	67,13
Kota Bekasi	65,86	Kota Bekasi	66,46

Sumber : BPS RI

Dari Tabel 3.2, pada urutan ketiga tertinggi di Tahun 2010 ternyata Kabupaten Bandung Barat yang pada Tahun 2010 ternyata bergeser menjadi urutan keempat pada Tahun 2011 Sedangkan urutan ketiganya diduduki oleh Kabupaten Bandung (68,26) pada Tahun 2011. Posisi kesembilan diduduki oleh Kota Bogor pada Tahun 2010 dan Tahun 2011. Sedangkan posisi kesembilan pada Tahun 2010 dan 2011 diduduki oleh Kota Bekasi. Kabupaten/kota lainnya yang termasuk dalam sepuluh urutan teratas berada pada posisi tetap, antara lain Kota Depok (72,68), Kota Bandung (69,65), Kota Tasikmalaya (68,11), Kota Cirebon (67,58), Kota Cimahi (67,40) dan Kota Sumedang (67,24). Untuk urutan

lima kabupaten/kota dengan IPG terendah juga terlihat tidak mengalami perubahan posisi.

Tabel 3.3. Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan IPG Terendah, Tahun 2010- 2011

2010	IPG	2011	IPG
Kabupaten Indramayu	49,47	Kabupaten Indramayu	50,79
Kabupaten Cianjur	52,14	Kabupaten Cianjur	52,55
Kabupaten Majalengka	56,91	Kabupaten Majalengka	57,82
Kabupaten Cirebon	57,23	Kabupaten Cirebon	57,84
Kota Banjar	58,72	Kota Banjar	59,40

Sumber : BPS RI

Pada Tahun 2010 dan 2011, posisi kabupaten/kota terendah adalah Kabupaten Indramayu (50,79), Kabupaten Cianjur (52,55), Kabupaten Majalengka (57,82), Kabupaten Cirebon (57,84) dan Kota Banjar (59,40).

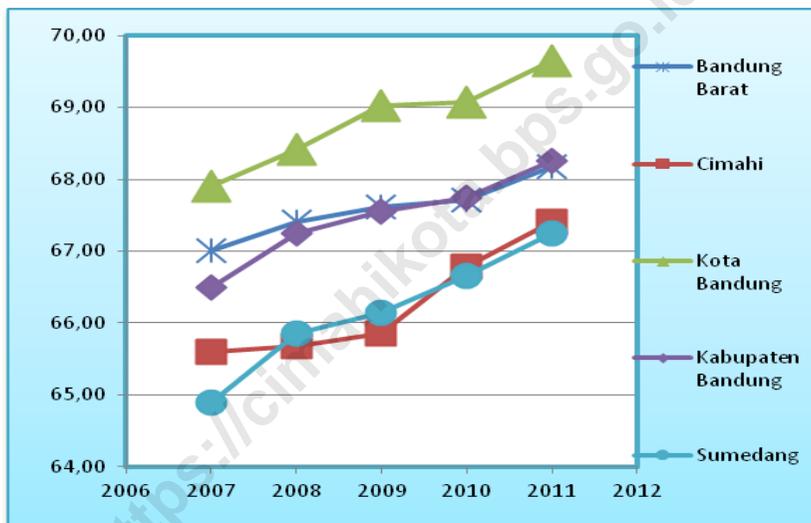
3.4 Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Gender di Wilayah Bandung Raya

Peningkatan IPG selama kurun waktu 2010-2011 di wilayah Bandung Raya tersebut tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen IPG itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2010-2011 mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Pada subbab ini akan dibahas perkembangan IPG di Wilayah

Bandung Raya dan perkembangan masing-masing komponen IPG di Wilayah Bandung Raya.

Pada peta Bandung Raya, periode Tahun 2007-2011, ranking IPG tertinggi adalah Kota Bandung sementara terendah adalah Kabupaten Sumedang. Hal ini terlihat dalam Grafik 3.7.

Grafik 3.7. Perkembangan IPG Wilayah Bandung Raya Tahun 2007 -2011



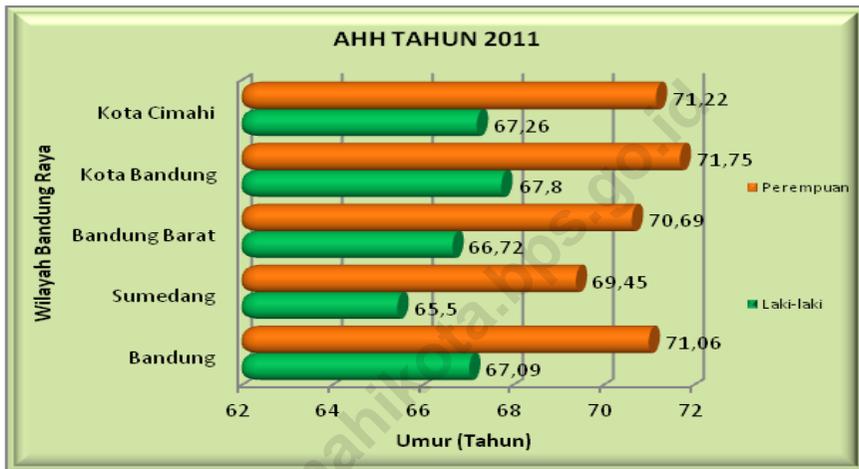
Sumber : BPS RI

3.4.1. Angka Harapan Hidup Wilayah Bandung Raya Tahun 2011

Dari Grafik 3.8 terlihat bahwa AHH perempuan di setiap daerah lebih tinggi dari AHH laki-laki. Pada Tahun 2011 AHH perempuan paling tinggi di wilayah Bandung Raya adalah Kota Bandung yaitu 71,22 tahun, dengan AHH laki-lakinya 67,80 tahun. Sedangkan urutan kedua AHH perempuan dari Kota Cimahi 71,22 Tahun dengan AHH laki-laki 67,26 tahun. Urutan ketiga AHH perempuan Kabupaten Bandung 71,06 tahun dengan AHH laki-lakinya 67,09 tahun. Di urutan keempat dan kelima AHH perempuan 70,69 tahun oleh Kabupaten Bandung Barat dan 69,45 tahun di Kabupaten Sumedang. Sedangkan

urutan AHH laki-laki keempat dan kelima sebesar 66,72 tahun dan 65,5 tahun. Jika dilihat secara umum AHH laki-laki cenderung empat tahun lebih rendah di banding AHH perempuan.

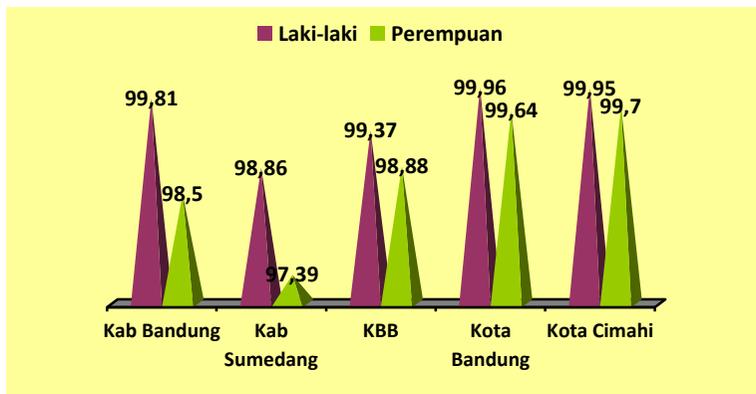
Grafik 3.8 Angka Harapan Hidup Tahun 2011 di Wilayah Bandung Raya



Sumber : BPS Kota Cimahi

3.4.2 Angka Melek Huruf di Wilayah Bandung Raya Tahun 2011

Grafik 3.9. Angka Melek Huruf (AMH) Laki-laki dan Perempuan Di Wilayah Bandung Raya Tahun 2011



Sumber : BPS RI

Pada 2011 AMH perempuan tertinggi di Bandung Raya adalah Kota Cimahi sebesar 99,7 persen, diikuti oleh Kota Bandung sebesar 99,64 persen. Sedang yang paling rendah adalah Kabupaten Sumedang sebesar 97,39 persen. Sementara itu untuk AMH laki-laki, empat kabupaten/kota itu telah mencapai angka diatas 99 persen, hanya Sumedang yang masih di bawah 99 persen. Yang paling tinggi adalah Kota Bandung sedangkan Kota Cimahi menempati posisi kedua.

3.4.3. Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Bandung Raya Tahun 2011

Sama halnya dengan AMH, untuk RLS baik laki-laki maupun perempuan capaian tertinggi di wilayah Bandung Raya adalah Kota Cimahi dan Kota Bandung. Kota Cimahi meraih prestasi tertinggi dengan capaian laki-laki sebesar 11,16 persen dan perempuan 10,29 persen. Kota Bandung berada di urutan kedua, diikuti Kabupaten Bandung di tempat ketiga.

Grafik 3.10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2011 di Wilayah Bandung Raya



Sumber : BPS Kota Cimahi

*Tabel-tabel
Lampiran*



Indeks Pembangunan Gender (IPG) Wilayah Bandung Raya Tahun 2010 - 2011

Nomor	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)			
		2010		2011	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Bandung	67,09	71,06	67,09	71,06
2	Kabupaten Sumedang	65,50	69,45	65,50	69,45
3	Kabupaten Bandung Barat	66,72	70,69	66,72	70,69
4	Kota Bandung	67,80	71,75	67,80	71,75
5	Kota Cimahi	67,26	71,22	67,26	71,22
	JAWA BARAT	66,27	70,25	66,27	70,25

Sumber : BPS RI

Indikator Angka Melek Huruf Wilayah Bandung Raya Tahun 2010 - 2011

Nomor	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf (Persen)			
		2010		2011	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Bandung	99,78	98,49	99,81	98,50
2	Kabupaten Sumedang	98,85	97,38	98,86	97,39
3	Kabupaten Bandung Barat	99,35	98,17	99,37	98,88
4	Kota Bandung	99,95	99,63	99,96	99,64
5	Kota Cimahi	99,94	99,59	99,95	99,70
JAWA BARAT		98,01	94,60	98,03	94,61

Sumber : BPS RI

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Bandung Raya Tahun 2010 - 2011

Nomor	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
		2010		2011	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki 2	Perempuan
1	Kabupaten Bandung	9,00	8,17	9,01	8,18
2	Kabupaten Sumedang	8,17	7,80	8,18	7,81
3	Kabupaten Bandung Barat	8,43	7,79	8,44	7,80
4	Kota Bandung	10,83	10,08	10,84	10,10
5	Kota Cimahi	11,15	10,28	11,16	10,29
JAWA BARAT		8,41	7,63	8,42	7,64

Sumber : BPS RI

Indikator Sumbangan Pendapatan Wilayah Bandung Raya Tahun 2010 - 2011

Nomor	Kabupaten/Kota	Sumbangan Pendapatan (persen)			
		2010		2011	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Kabupaten Bandung	68,9	31,1	68,49	31,51
2	Kabupaten Sumedang	67,73	32,27	67,21	32,79
3	Kabupaten Bandung Barat	67,73	32,27	68,28	31,72
4	Kota Bandung	68,72	31,28	68,12	31,88
5	Kota Cimahi	70,92	29,08	69,07	30,93
JAWA BARAT		72,71	27,29	72,62	27,38

Sumber : BPS RI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2007-2011

Kabupaten/ Kota		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	70,08	70,66	71,35	72,16	72,58
2	Sukabumi	69,21	69,66	70,17	70,66	71,06
3	Cianjur	67,65	68,17	68,66	69,14	69,59
4	Bandung	72,97	73,41	73,84	74,05	74,43
5	Garut	69,99	70,52	70,98	71,36	71,70
6	Tasikmalaya	71,24	71,35	71,73	72,00	72,51
7	Ciamis	70,14	70,57	70,96	71,37	71,81
8	Kuningan	69,70	70,12	70,42	70,89	71,55
9	Cirebon	67,30	67,70	68,37	68,89	69,27
10	Majalengka	68,94	69,40	69,94	70,25	70,81
11	Sumedang	71,30	71,68	72,14	72,42	72,67
12	Indramayu	66,22	66,78	67,39	67,75	68,40
13	Subang	70,03	70,43	70,86	71,14	71,50
14	Purwakarta	69,88	70,31	70,79	71,17	71,59
15	Karawang	68,45	69,06	69,47	69,79	70,28
16	Bekasi	71,55	72,10	72,47	72,93	73,54
17	Kab Bandung Barat	72,29	72,65	72,99	73,35	73,80
18	Kota Bogor	74,73	75,16	75,47	75,75	76,08
19	Kota Sukabumi	73,66	74,17	74,57	74,91	75,36
20	Kota Bandung	74,86	75,35	75,54	76,06	76,39
21	Kota Cirebon	73,87	74,26	74,68	74,93	75,42
22	Kota Bekasi	75,31	75,73	76,10	76,36	76,68
23	Kota Depok	77,89	78,36	78,77	79,09	79,36
24	Kota Cimahi	74,42	74,79	75,17	75,51	76,01
25	Kota Tasikmalaya	72,75	73,35	73,96	74,40	74,85
26	Kota Banjar	70,17	70,61	70,98	71,38	71,82
JAWA BARAT		70,71	71,12	71,64	72,29	72,73

Sumber :BPS RI

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2007-2011

Kabupaten/ Kota		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	60,70	60,91	61,18	61,52	62,14
2	Sukabumi	58,50	58,98	59,16	59,40	60,05
3	Cianjur	50,10	50,72	51,01	52,14	52,55
4	Bandung	66,50	67,24	67,55	67,75	68,26
5	Garut	61,80	62,44	62,72	62,91	63,57
6	Tasikmalaya	57,80	58,28	58,48	59,63	60,53
7	Ciamis	64,10	64,10	64,25	65,25	66,15
8	Kuningan	59,0	59,30	59,53	60,19	61,17
9	Cirebon	55,50	56,50	56,99	57,23	57,84
10	Majalengka	55,40	56,14	56,68	56,91	57,82
11	Sumedang	64,90	65,85	66,15	66,66	67,24
12	Indramayu	47,30	47,97	48,51	49,47	50,79
13	Subang	60,50	61,11	61,36	61,99	62,37
14	Purwakarta	60,70	61,16	61,33	62,01	62,40
15	Karawang	58,3	58,74	59,34	59,69	60,58
16	Bekasi	57,00	57,52	58,06	58,85	59,87
17	Bandung Barat	67,00	67,41	67,61	67,72	68,17
18	Kota Bogor	65,30	65,31	65,64	66,43	67,13
19	Kota Sukabumi	61,70	62,16	62,50	62,87	63,63
20	Kota Bandung	67,90	68,41	69,02	69,08	69,65
21	Kota Cirebon	65,80	66,19	66,49	67,01	67,58
22	Kota Bekasi	64,40	64,87	65,03	65,86	66,46
23	Kota Depok	71,40	71,69	71,84	71,94	72,68
24	Kota Cimahi	65,60	65,68	65,85	66,78	67,40
25	Kota Tasikmalaya	66,30	66,63	67,25	67,44	68,11
26	Kota Banjar	57,40	57,77	58,25	58,72	59,40
JAWA BARAT		61,40	61,81	61,84	62,38	63,25

Sumber BPS RI

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2011

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)		IPG	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bogor	66,94	70,90	98,14	93,30	8,21	7,48	74,58	25,42	61,52	62,14
2	Sukabumi	65,15	69,09	99,27	96,44	7,13	6,45	74,45	25,55	59,40	60,05
3	Cianjur	64,11	68,00	99,28	97,53	7,14	6,51	80,93	19,07	52,14	52,55
4	Bandung	67,09	71,06	99,81	98,50	9,01	8,18	68,49	31,51	67,75	68,26
5	Garut	63,72	67,59	99,34	98,14	7,62	7,09	70,97	29,03	62,91	63,57
6	Tasikmalaya	66,03	70,01	99,65	98,34	7,71	7,02	74,48	25,52	59,63	60,53
7	Ciamis	65,37	69,32	99,14	96,76	7,88	7,44	67,61	32,39	65,25	66,15
8	Kuningan	65,55	69,51	98,41	94,59	7,73	7,12	73,34	26,66	60,19	61,17
9	Cirebon	63,42	67,28	95,46	88,75	7,40	6,51	74,23	25,77	57,23	57,84
10	Majalengka	64,46	68,36	98,66	92,86	7,76	6,80	76,66	23,34	56,91	57,82
11	Sumedang	65,50	69,45	98,86	97,39	8,18	7,81	67,21	32,79	66,66	67,24
12	Indramayu	64,92	68,84	92,85	77,44	6,97	5,23	81,35	18,65	49,47	50,79
13	Subang	67,47	71,43	95,53	88,58	7,61	6,38	71,74	28,26	61,99	62,37
14	Purwakarta	65,15	69,08	98,41	94,81	8,19	7,07	73,76	26,24	62,01	62,40
15	Karawang	64,79	68,71	96,89	90,84	7,99	6,73	74,15	25,85	59,69	60,58
16	Bekasi	67,47	71,43	96,98	91,69	9,16	8,02	76,86	23,14	58,85	59,87
17	Kab Bandung Barat	66,72	70,69	99,37	98,88	8,44	7,80	68,28	31,72	67,72	68,17
18	Kota Bogor	66,94	70,91	99,16	98,07	10,94	8,98	71,53	28,47	66,43	67,13
19	Kota Sukabumi	67,52	71,47	99,93	99,36	9,89	9,32	74,26	25,74	62,87	63,63
20	Kota Bandung	67,80	71,75	99,96	99,64	10,84	10,10	68,12	31,88	69,08	69,65
21	Kota Cirebon	66,57	70,54	99,54	97,02	10,81	9,29	69,99	30,01	67,01	67,58
22	Kota Bekasi	67,72	71,67	99,83	98,37	11,22	10,16	73,07	26,93	65,86	66,46
23	Kota Depok	71,25	75,05	99,84	98,50	11,90	10,54	69,18	30,82	71,94	72,68
24	Kota Cimahi	67,26	71,22	99,95	99,70	11,16	10,29	69,07	30,93	66,78	67,40
25	Kota Tasikmalaya	67,94	71,89	99,85	99,28	9,33	8,44	69,40	30,60	67,44	68,11
26	Kota Banjar	64,37	68,27	98,67	96,17	8,67	7,79	75,79	24,21	58,72	59,40
	JAWA BARAT	66,27	70,25	98,03	94,61	8,42	7,64	72,62	27,38	62,38	63,25

Sumber :BPS RI

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
Jl. Entjep Kartawiria No.20 B Citeureup Cimahi
Telp/Fax: (022) 6645985, e-mail:bps3277@bps.go.id
Home Page: cimahikota.bps.go.id